

**LITERASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG  
(MONEY POLITICS) DI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Annisa Nur Syafitri

NPP. 31.0253

Asdaf Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: [annisanursyafitri3@gmail.com](mailto:annisanursyafitri3@gmail.com)

Pembimbing Skripsi:

Astika Ummy Athahirah, S.STP., M.Si

**ABSTRACT**

**Proble/Background (GAP):** The high rate of money politics in 2019 in South Bangka Regency has influenced the increasing vulnerability of money politics in the 2024 election period. This is proven by Bawaslu's statement reflecting on the 2019 Election, the Election Supervisory Body stated that South Bangka Regency was included in the top 20 regions that are prone to money politics, which is in 18th place in Indonesia in the 2024 Election and ranks the second highest level of money politics in the Bangka Belitung Islands Province. **Purpose:** This research aims to find out about Political Literacy in preventing money politics in South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province and to obtain an overview of the efforts needed to increase community political literacy in preventing money politics. **Method:** This research uses a postpositivist paradigm approach called Quasi-Qualitative Design (QQD) or semi-qualitative. Data was obtained through observation, interviews and documentation and processed using triangulation data collection techniques. **Result/Findings:** Researchers use political literacy theory according to Madhok by using 4 elements of political literacy that can be identified and measured. The results of the research show that the political literacy of the community in preventing money politics in South Bangka Regency is still not sufficient and very convincing because the results of the interviews show that the community has minimal knowledge regarding government structures, low interest in political news and issues and low understanding regarding political society. money and its application to democracy. To increase public political literacy in preventing money politics in South Bangka Regency, the necessary steps are the responsibility of the South Bangka Regency Regional Government, especially the National Unity and Political Agency which collaborates with the General Election Supervisory Agency and the Election Commission. General. **Conclusions:** Therefore, researchers suggest that cooperation between stakeholders is very necessary in increasing political literacy in preventing money politics.

**Keywords:** Political Literacy, Prevention, Money Politics

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tingginya angka politik uang pada tahun 2019 di Kabupaten Bangka Selatan, berpengaruh terhadap meningkatnya kerawanan politik uang di masa pemilu 2024 nanti. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Bawaslu yang berkaca pada Pemilu 2019, Badan pengawasan pemilihan Umum menyatakan Kabupaten Bangka Selatan masuk kedalam peringkat 20 besar daerah yang rawan politik uang (*money politics*) yang mengisi kedudukan di urutan ke 18 se-Indonesia pada Pemilu 2024 dan menempati urutan kedua politik uang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Literasi Politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (*money politics*). **Metode** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Literasi Politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (*money politics*). **Hasil/Temuan** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan masih belum cukup dan sangat mengkhawatirkan karena dari hasil wawancara menyatakan minimnya pengetahuan masyarakat terkait struktur pemerintahan, rendahnya minat terhadap berita dan isu politik serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait politik uang dan implikasinya terhadap demokrasi. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di kabupaten Bangka Selatan diperlukan langkah yang diperlukan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Peneliti menyaran bahwa kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan dalam meningkatkan literasi politik dalam pencegahan politik uang.

**Kata Kunci:** Literasi Politik, Pencegahan, Politik Uang

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tahun 2019, potensi praktik politik uang dengan mendasarkan pada subdimensi kampanye, partisipasi pemilih, relasi kuasa tingkat lokal, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu, dan partisipasi publik terdapat 177 kabupaten/kota yang presentase angkanya mencapai 34% dengan tingkat kerawanan tinggi, dan 337 kabupaten/kota yang presentase angkanya mencapai 65,6% dengan tingkat kerawanan sedang (Bawaslu, 2018:205). Dari uraian data IKP pada paragraf sebelumnya, menunjukkan politik uang terjadi di

seluruh pelosok negeri dan ini menjadi salah satu prioritas utama Bawaslu dalam penurunan kerawanan yang harus dilakukan, sebab kasus politik uang (money politics) menjadi kasus yang paling dominan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Maraknya politik uang (money politics) di Indonesia dibuktikan dengan tercatatnya kasus money politics sebanyak 166 kasus pada pemilihan kepala daerah 2020, 31 kasus terjadi pada pemilihan umum 2019 dan 50 kasus pada pemilihan umum 2020 (Cnnindonesia, 2020). Laporan dugaan politik uang (money politics) juga terjadi di Bangka Selatan. Pada tahun 2019, Bangka Selatan termasuk kedalam kabupaten dengan tingkat politik uang tertinggi yaitu menduduki urutan kedua se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini dibuktikan dengan data dugaan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikut ini:

**Tabel 1. 1**  
**Data Temuan dan Laporan Dugaan Praktik Politik Uang**  
**Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	WILAYAH	LAPORAN	TEMUAN
1.	Pangkalpinang	-	-
2.	Bangka Barat	1	-
3.	Bangka Selatan	3	1
4.	Bangka Tengah	-	1
5.	Bangka	2	3
6.	Belitung	-	1
7.	Belitung Timur	2	1
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	

Sumber: Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa melalui data dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) jumlah total temuan dan laporan dugaan praktik politik uang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 15 laporan dan temuan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menempati urutan 3 besar sebagai kabupaten/kota dengan jumlah temuan dan laporan money politics tertinggi di Bangka Belitung. Dalam posisi 3 besar tersebut, Bangka Selatan menempati urutan kedua dengan jumlah 1 temuan dan 3 laporan dugaan politik uang (money politics). Uraian di atas, menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bangka Selatan. Apalagi tingginya angka politik uang di 2019, berpengaruh terhadap meningkatnya kerawanan politik uang di masa pemilu 2024 nanti. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Bawaslu yang berkaca pada Pemi 2019, Bawaslu menyatakan Kabupaten Bangka Selatan masuk kedalam peringkat 20 besar daerah yang rawan politik uang (money politics) yang mengisi kedudukan di urutan ke 18 se-Indonesia pada Pemilu 2024 (wowbabel.com, 2023). Sehingga dapat dikatakan Bangka Selatan lebih rawan politik uang (money politics) dibandingkan dengan Kabupaten Bangka. Dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana gambaran literasi politik masyarakat di Bangka Selatan di tengah-tengah kondisi banyaknya

faktor yang menghambat pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena maraknya politik uang juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik sehingga akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, salah satu dampak buruk tersebut yaitu membuat masyarakat tidak sepenuhnya mengerti dan memahami hak pilih mereka serta pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi. Orang-orang yang tidak memahami hak pilih mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih tanpa harus menerima uang atau barang dari calon politik.

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP)**

Tingginya angka politik uang di 2019, berpengaruh terhadap meningkatnya kerawanan politik uang di masa pemilu 2024 nanti. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Bawaslu yang berkaca pada Pemilu 2019, Bawaslu menyatakan Kabupaten Bangka Selatan masuk kedalam peringkat 20 besar daerah yang rawan politik uang (money politics) yang mengisi kedudukan di urutan ke 18 se-Indonesia pada Pemilu 2024 (wowbabel.com, 2023). Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Selatan, yang dalam salah satu tugasnya melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri, dua diantaranya adalah pendidikan politik dan etika budaya politik. Sehingga, Bakesbangpol punya peran penting dalam memberikan pembinaan pendidikan politik dan etika budaya politik untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di Bangka Selatan.

Dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana gambaran literasi politik masyarakat di Bangka Selatan di tengah-tengah kondisi banyaknya faktor yang menghambat pemerintah dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena maraknya politik uang juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman politik sehingga akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat, salah satu dampak buruk tersebut yaitu membuat masyarakat tidak sepenuhnya mengerti dan memahami hak pilih mereka serta pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi. Orang-orang yang tidak memahami hak pilih mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memilih tanpa harus menerima uang atau barang dari calon politik.

Masyarakat mungkin akan merasa bahwa politik uang adalah bagian alami dari proses pemilihan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui lebih dalam seperti apa gambaran literasi politik masyarakat untuk mencegah politik uang (money politics) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan utamanya Bakesbangpol Kabupaten Bangka Selatan dibantu oleh lembaga politik lain seperti KPU dan Bawaslu. Sehingga dari paparan di atas, peneliti ingin lebih tau sebenarnya bagaimana gambaran literasi politik masyarakat Bangka Selatan dalam pencegahan politik uang (money politics) dan apa upaya yang diperlukan oleh Pemerintah dalam peningkatan literasi politik masyarakat untuk mencegah politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi penting dalam persiapan untuk Pemilihan umum di periode berikutnya untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengurangi politik uang

dan meningkatkan literasi politik di tingkat lokal, serta memperkuat integritas sistem demokratis di Kabupaten Bangka Selatan. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Literasi Politik Masyarakat Dalam Pencegahan Politik Uang (Money Politics) Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam memberikan perbandingan permasalahan dan teori antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan digunakan saat ini terkait literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian yang dilakukan oleh (Pahlevi & Amrurrobi, 2020) berjudul Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Terdapat kesamaan pada fokus penelitian topik yang dibahas yaitu pencegahan politik uang. Namun juga terdapat perbedaan pada media pelaksanaan pencegahan politik uang oleh (Pahlevi & Amrurrobi, 2020), yaitu pencegahan politik uang melalui Gerakan Masyarakat Desa dengan pendidikan politik sedangkan peneliti fokus pada pencegahan politik uang di Kabupaten Bangka Selatan melalui literasi politik masyarakat.

Perbedaan lainnya terdapat pada penggunaan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu teori literasi politik (Madhok, 2005:176) dalam menganalisis gambaran literasi politik masyarakat terkait dengan pencegahan politik uang. Selain itu peneliti juga tidak menemukan penelitian terdahulu yang lokasi penelitiannya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga peneliti dalam penelitian ini akan menghasilkan implikasi yang berbeda terkait dengan cara meningkatkan literasi politik masyarakat sebagai upaya pencegahan politik uang. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017), membahas tentang Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dampak Literasi Politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu di Kabupaten Solok. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada bagaimana gambaran literasi politik Masyarakat dalam pencegahan politik uang dan bagaimana gambaran Upaya yang akan dilakukan atau harus dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rosit et al., 2024) yang membahas tentang Penguatan Literasi Politik Warga Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini Alternatif untuk mengurangi dampak negatif dalam praktek pemilu 2024 dan menjadi pemilih atau warga yang rasional, cerdas dan kritis dalam rangka untuk menguatkan dan menjadikan kualitas demokrasi yang substantif. Dari fokus penelitian sudah terlihat perbedaan, namun masih terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh (Ali Rasyid, 2023) sebagai referensi dan memiliki kesamaan dan perbedaan dalam fokus, metode dan teori yang digunakan. Penelitian oleh (Ali Rasyid, 2023) berfokus pada memberikan pemahaman tentang konsep serta kepentingan literasi politik dalam pemilu, model dan peranan pendidikan dalam membangun literasi politik, strategi dan

tantangan serta dampak meningkatkan literasi politik melalui pendidikan terhadap pemilihan umum. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Sahid et al, 2017), menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang tentu saja berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan metode kuasi kualitatif. Untuk fokus utamanya memiliki kesamaan yaitu literasi politik Masyarakat. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sahid et al, 2017) lebih banyak membahas bagaimana manajemen politik di pesisir.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian terkait literasi politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Literasi politik masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan dalam pencegahan politik uang masih belum ada yang membahas. Pengkajian terkait Literasi politik masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan dalam pencegahan politik uang berdasar pencarian Peneliti belum ditemukan. Masyarakat mungkin akan merasa bahwa politik uang adalah bagian alami dari proses pemilihan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui lebih dalam seperti apa gambaran literasi politik masyarakat untuk mencegah politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan utamanya Bakesbangpol Kabupaten Bangka Selatan dibantu oleh lembaga politik lain seperti KPU dan Bawaslu yang dikaitkan dengan Teori Literasi Politik oleh (Madhok, 2005:176)

#### **1.5 Tujuan**

Melihat rincian rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1. Menganalisis dan memperoleh gambaran mengenai literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan.  
2. Menganalisis dan memperoleh gambaran mengenai upaya yang diperlukan untuk peningkatan literasi politik masyarakat dalam mencegah politik uang (*money politics*) di Kabupaten Bangka Selatan.

## **2 METODE**

Penelitian ini menggunakan Paradigma postpositivisme dengan metode kuasi kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran literasi politik Masyarakat dalam pencegahan politik uang (*money politics*) serta memperoleh gambaran upayanya. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data penelitian. Dalam triangulasi data, peneliti menggunakan Teknik yang berbeda-beda meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuan memperoleh data dari sebuah sumber yang sama (Simangunsong, F. 2017). (Sugiyono, 2019) agar memastikan keakuratan data dan fakta, penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan dan berinteraksi secara langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka Selatan dan Masyarakat. Peneliti menggunakan tahapan pengumpulan data yang disebut oleh Straus dan Glaser (1967) (Bungin, 2020:183) sebagai *theoretical*

*sampling*. Dimana sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Menggunakan Teori literasi politik oleh (Madhok, 2005:176)

### **3 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Literasi Politik Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Teori Literasi Politik Madhok**

##### **1. Kehirauan dan Kesadaran Pentingnya Aktivitas Institusi Politik**

Kehirauan merupakan kegelisahan yang telah terkonsep dalam psikologi sosial yang dijadikan sebagai cara untuk mencegah suatu hal tertentu. Kehirauan dapat muncul dengan adanya kesadaran dari manusia itu sendiri terhadap pentingnya suatu hal. Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas institusi politik, kewenangan dan perannya dalam masyarakat sangat penting guna mencegah terjadinya politik uang (*money politics*).

Dalam hal ini, perlu kehirauan dan kesadaran masyarakat Bangka Selatan akan pentingnya aktivitas institusi politik, kewenangan dan perannya tersebut. Ada beberapa indikator seperti pengetahuan masyarakat, partisipasi aktif dalam partai politik, partisipasi demonstrasi dan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menilai kinerja pemerintah. Beberapa indikator diatas tersebut menjadi alat ukur bagaimana gambaran kehirauan dan kesadaran masyarakat yang ada di masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Apakah masyarakat masuk dalam kategori masyarakat yang memiliki kehirauan dan kesadaran yang tinggi atau justru sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian masyarakat di Bangka Selatan masih belum memiliki kehirauan dan kesadaran akan pentingnya aktivitas institusi politik, kewenangan dan perannya. Dinilai dari salah satu indikator yaitu indikator pengetahuan masyarakat dalam mengetahui struktur pemerintahan dan mengetahui berita isu politik, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat kurang dalam hal berpartisipasi dalam partai politik, berpartisipasi demonstrasi dan menilai kinerja pemerintah.

##### **2. Kemampuan Opini dan Otonomi Posisi**

Opini berarti tanggapan atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat diungkapkan secara tertulis maupun lisan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan untuk lebih suka mengutarakan pendapatnya secara lisan dan merasa lebih nyaman menyampaikan pendapatnya tentang politik. Masyarakat dapat mengekspresikan pendapat mereka terhadap politik dengan menunjukkan bahwa mereka mempunyai cara pandang untuk melihat dan memahami politik itu sendiri. Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas, masyarakat di Bangka Selatan mampu mengemukakan pendapat dan mempunyai otonomi dalam pandangan politiknya. Hal ini terlihat dari kemampuan kedua informan dalam menganalisis isu-isu politik, seperti perdebatan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, informan mempunyai kemampuan untuk mengemukakan pendapatnya mengenai hak pilih apabila selalu menggunakan hak pilihnya. Dengan harapan dengan menggunakan hak pilihnya dapat memajukan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemampuan yang mereka miliki menunjukkan kemampuan mereka dalam membentuk opini dan otonomi posisi dalam proses politik untuk menghasilkan suatu hasil politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kemampuan menganalisis isu politik dan mengekspresikan pendapat melalui hak suara tersebut masyarakat di Bangka Selatan cukup memiliki literasi politik yang baik dalam dimensi kemampuan opini dan otonomi posisi.

##### **3. Pengetahuan Kebijakan, Perencanaan Dana Anggaran Pemerintah**

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan landasan bagi rencana kerja, kepemimpinan, dan tindakan. Masyarakat harus memiliki pengetahuan kebijakan baik dari perencanaan hingga anggaran. Dengan adanya pengetahuan tersebut masyarakat dapat menilai kinerja pemerintahan. Kebijakan-kebijakan dapat diketahui melalui pemerintah langsung maupun instansi terkait. Seperti kebijakan politik yang dapat diketahui melalui instansi Bakesbangpol, Bawaslu dan KPU yang disampaikan melalui berita langsung maupun sosialisasi ke masyarakat. Didapatkan dari wawancara ketiga informan di atas bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal politik. Pengetahuan kebijakan tersebut tentunya sangat penting bagi masyarakat terutama pengetahuan kebijakan politik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menjadi sasaran utama calon pemimpin dalam berpolitik. Dengan adanya pengetahuan kebijakan masyarakat diharapkan dapat mengurangi kecurangan dalam berpolitik seperti money politics.

Pengetahuan kebijakan menjadi salah satu indikator dalam dimensi pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dana anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pengetahuan kebijakan menjadi tolak ukur tingkat literasi politik di masyarakat. Dalam hal ini, literasi politik dalam dimensi pengetahuan kebijakan masyarakat di Bangka Selatan masih rendah dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bahkan terkait peraturan dana anggaran yang digunakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi saja masyarakat tidak paham.

#### 4. Partisipasi Dalam Kegiatan Politik

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang yang memiliki komitmen mental dan emosional untuk mencapai tujuan dan mengambil tanggung jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik sangatlah penting karena masyarakat merupakan actor utama dalam politik. Masyarakat perlu berpartisipasi guna memikirkan nasib bangsa dalam memilih seorang pemimpin yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi maka mereka tidak tahu bagaimana keadaan pemerintahan dan tidak mengetahui calon pemimpin yang akan mereka pilih. Ibaratkan membeli kucing dalam karung dalam konteks politik. Dilihat dari hasil wawancara informan masih kurangnya partisipasi masyarakat Bangka Selatan dalam kegiatan politik seperti ikut serta dalam kegiatan maupun diskusi. Namun, untuk partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu berhasil dilakukan. Akan tetapi tetap saja masyarakat kurang bekal pengetahuan politik, karena dalam menentukan pilihan masyarakat harus mampu memilih pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. Tidak asal-asalan memilih saja dan menganggap bahwa 1 suara menentukan masa depan 5 tahun sampai dengan 10 tahun kedepannya. Sebagian besar masyarakat yang di wawancara oleh peneliti secara langsung mengatakan bahwa saat datang ke TPS saja mereka belum ada pilihan sehingga sangat benar jika peneliti menyimpulkan masyarakat Bangka Selatan kurang dibekali pengetahuan politik sehingga tidak mampu menentukan pilihannya.

Ketika masyarakat Bangka Selatan sebagian besar berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam Pemilu, hal yang sebaliknya terjadi pada tingkat partisipasi masyarakat Bangka Selatan dalam kegiatan politik seperti ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik maupun diskusi. Hal ini tentunya didukung dengan

berbagai kemungkinan. Masyarakat yang takut akan keikutsertaan dalam politik atau tidak adanya informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak terkait. Selain menjadi pemeran utama dalam berpolitik, partisipasi masyarakat dalam diskusi politik ataupun kampanye sangatlah penting karena menjadi indikator dalam dimensi partisipasi dalam kegiatan politik. Dimensi partisipasi dalam kegiatan politik menjadi salah satu tolak ukur pentingnya literasi politik dalam pencegahan pelanggaran money politics. Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Bangka Selatan masih kurang dalam partisipasi kegiatan politik. Sehingga pada salah satu dimensi yaitu Partisipasi Kegiatan Politik belum tercapai untuk masyarakat Kabupaten Bangka Selatan karena dinilai masih rendah.

### **3.2 Gambaran Langkah Yang Diperlukan Dalam Peningkatan Literasi Politik Masyarakat Untuk Mencegah Politik Uang (Money Politics)**

Sebelum membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Khususnya Bakesbangpol, ada beberapa saran terhadap peningkatan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics). Saran tersebut didapatkan ketika Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan di lapangan. Saran tersebut antara lain:

- a. Sosialisasi dalam bentuk poster yang disebar di jalan
- b. Sosialisasi rutin cegah politik uang kepada masyarakat
- c. Cegah money politik mulai dari diri dan keluarga
- d. Sosialisasi di social media dalam bentuk postingan cegah politik uang
- e. Menekankan efek negative money politik saat sosialisasi kepada masyarakat
- f. Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga, pengawas pemilu, LSM, Media Massa dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan politik dan meningkatkan koordinasi dalam upaya cegah politik uang
- g. Melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan masyarakat seperti diskusi/pertemuan warga terkait isu politik dan upaya pencegahannya
- h. Menyediakan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik bagi seluruh unsur masyarakat secara merata.

Untuk menentukan upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang, beberapa diantaranya :

1. Rutin melakukan kegiatan sosialisasi cegah politik uang kepada masyarakat, sehingga Bakesbangpol dapat menjadwalkan sosialisasi dan program pendidikan politik yang menyeluruh dan terstruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik uang, termasuk dampaknya terhadap demokrasi dan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah politik uang, termasuk cara-cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik politik uang.
2. Peningkatan Akses Informasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi politik yang akurat dan dapat dipercaya, baik melalui penyediaan literatur, seminar, diskusi publik, atau platform online. Salah satu contohnya adalah penggunaan media poster sebagai alat sosialisasi di Jalan. Dalam hal ini, Bakesbangpol bisa bekerjasama dengan Bawaslu untuk dapat membuat dan menyebarkan poster tentang cegah politik uang yang dipasang di tempat-tempat strategis di jalan atau tempat umum lainnya agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga akan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap informasi politik, dan semakin tinggi juga tingkat literasi politik mereka.

3. Aktif dalam Sosialisasi di Media Sosial. Untuk mencegah politik uang dan meningkatkan literasi politik masyarakat, Bakesbangpol dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi dan kampanye edukasi tentang politik uang. Ini termasuk membuat konten-konten yang menarik dan edukatif, serta membangun keterlibatan masyarakat melalui platform-platform digital.

4. Pelatihan dan Workshop, yang mana Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang politik uang bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih, pemuda, perempuan, dan masyarakat umum. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang praktik politik uang, cara melaporkan pelanggaran, dan pentingnya partisipasi politik yang bersih.

Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menganalisis menggunakan teori namun juga menggunakan peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2020 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka Selatan dalam melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri yaitu pendidikan Politik dan etika budaya politik. Fenomena di lapangan saat ini belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan No. 39 Tahun 2020, karena kurangnya pendidikan politik sebagai media edukasi politik bagi Masyarakat sehingga angka politik uang meningkat.

Harapan kedepannya, dengan mengimplementasikan berbagai Upaya secara konsisten dan terkoordinasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Selatan dapat meningkatkan literasi politik Masyarakat dalam pencegahan politik uang secara signifikan.

### **3.3 Diskusi Temua Utama Penelitian**

Literasi Politik Masyarakat Dalam Pencegahan Politik Uang di Kabupaten Bangka Selatan masih sangat megkhawatirkan. Dari penelitian ini, kondisi Masyarakat masih banyak yang belum paham apa yang dimaksud dengan politik uang dan implikasinya bagi Demokrasi kita. Hasil wawancara menyatakan Sebagian besar Masyarakat khususnya yang latar belakang sebagai Ibu Rumah Tangga, Petani dan pedagang yang masih perlu dibekali pengetahuan ataupun edukasi politik yang cukup. Sehingga Kabupaten Bnagka Selatan perlu melakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh Masyarakat.

## **4 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan secara keseluruhan dalam bab sebelumnya sehubungan dengan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan masih belum cukup dan sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan teori (Madhok, 2005:176) mengenai literasi politik masyarakat, dari empat dimensi yang menjadi indikator, dimensi Kehirauan dan Kesadaran Pentingnya Aktivitas Institusi Politik, dimensi Pengetahuan Kebijakan, Perencanaan Dana Anggaran Pemerintah dan dimensi Partisipasi Dalam Kegiatan Politik masih menjadi dimensi yang menunjukkan adanya kekurangan. Kekurangan ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman masyarakat akan struktur pemerintahan dan peranannya, masyarakat yang tidak tahu sama sekali berita dan isu politik saat ini bahkan sebagian besar

masyarakat tidak memiliki ketertarikan untuk tahu bagaimana kondisi politik saat ini. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan organisasi politik, diskusi politik, kampanye ataupun kegiatan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek politik, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang proses politik dan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan demokrasi. Selain itu, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait money politics dan implikasinya terhadap demokrasi, sehingga yang terjadi adalah sebagian besar masyarakat akan terperangkap kedalam permainan politik uang oleh pelaku politik yang tidak bertanggungjawab. Gambaran literasi politik masyarakat yang masih kurang dan sangat mengkhawatirkan ini dipengaruhi oleh faktor utama yaitu minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada seluruh unsur masyarakat di Bangka Selatan karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata.

2. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang bekerjasama dengan Bawaslu maupun KPU. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat guna mencapai keberhasilan dalam pencegahan politik uang dengan meningkatkan literasi politik masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Adapun dalam rangka pencegahan politik uang (money politics) di Kabupaten Bangka Selatan, ada beberapa gambaran upaya yang diperlukan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah :
  - a) Rutin melakukan kegiatan sosialisasi cegah politik uang kepada masyarakat, sehingga Bakesbangpol dapat menjadwalkan sosialisasi dan program pendidikan politik yang menyeluruh dan terstruktur.
  - b) Meningkatkan akses untuk informasi politik dengan menggunakan berbagai media, yaitu penyediaan literatur, seminar, dan platform online.
  - c) Aktif dalam Sosialisasi di Media Sosial. Untuk mencegah politik uang dan meningkatkan literasi politik masyarakat, Bakesbangpol dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi dan kampanye edukasi tentang politik uang.
  - d) Pelatihan dan Workshop, yang mana Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang politik uang bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih, pemuda, perempuan, dan masyarakat umum.

**Keterbatasan Penelitian:** Informan yang digunakan masih terbatas karena hanya mengambil sample 5 orang per kecamatan sehingga jika ditotalkan hanya 43 informan sebagai perwakilan yang dipilih oleh peneliti untuk digali dan dianalisis gambaran literasi politik masyarakatnya dan apa Upaya yang tepat dilakukan.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Pengembangan penelitian terkait meningkatkan literasi politik masyarakat dalam pencegahan politik uang (*money politics*) dan menciptakan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan melek politik untuk mencegah *money politics* dalam Pemilihan Umum, pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif kedepannya untuk terus diperbarui sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat serta ilmu pengetahuan. Penelitian masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan metode baru yang lebih efisien dan akurat dalam pengumpulan maupun analisis data. Serta menambah lagi jumlah informan untuk mendapatkan hasil analisis gambaran yang lebih akurat.

## 5 UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan hormat kepada pihak yang telah terlibat dalam penelitian, utamanya Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak kalah penting juga diucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral maupun emosional selama proses penelitian, serta diucapkan terimakasih kepada yang terkasih Mohamad Aditya Pratama yang telah menemani dan memberikan warna bagi peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini.

## 6 DAFTAR PUSTAKA

- Madhok, S. (2005). Autonomy, political literacy and the social woman: Towards a politics of inclusion. *Rethinking Indian Political Institutions*, 151–168. <https://doi.org/10.7135/UPO9781843317524.009>
- Ali Rasyid, F. (2023). Membangun Literasi Politik Melalui Pendidikan Untuk Pemilu Yang Bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 27–
- Bungin, B. (2020). *Social Research Methods (Post-Qualitative)*.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Sahid Gatara, A. A., & Nurjaman, K. (2017). *Literasi Politik Masyarakat Pesisir Dan Manajemen Partai Politik*. *Journal.Uinsgd.Ac.Id*. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2276/0>
- Simangunsong, F. (2017). *Metologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Cnnindonesia. (2020). Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop Baca artikel CNN Indonesia “Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020 Disetop” selengkapnya di sini:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasu>. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasu-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop> kompas.com. (2023). search @ www.google.com. <https://www.google.com/search?q=Indonesia+merupakan+negara+yang+menganut+sistem+politik+demokrasi+itu+sendiri%2C+dimana+setiap+warga+negara+ikut+serta+dalam+penyelenggaraan+pemerintahan&oq=Indonesia+merupakan+negara+yang+menganut+sistem+politik+demokrasi> Kompasiana.com. (2017). sistem-politik-demokrasi @ www.kompasiana.com. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/lisdianaulfa/59ba5591a7249b2f891f1e62/sistem-politik-demokrasi> wowbabel.com. (2023). Bawaslu Ungkap Bangka Selatan Paling Rawan Politik Uang di Bangka Belitung, Masuk Daftar 20 Besar di Indonesia. Wowbabelpkp. <https://www.wowbabel.com/nasional/59810943413/bawaslu-ungkap-bangka-selatan-paling-rawan-politik-uang-di-bangka-belitung-masuk-daftar-20-besar-di-indonesia> lintasbabel.inews.id. (2024). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) merilis pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 mengenai isu strategis politik uang. <https://lintasbabel.inews.id/read/407041/babel-masuk-10-besar-wilayah-paling-rawan-politik-uang-di-indonesia-bangka-selatan-tertinggi> Bawaslu. (2018). Indeks Kerawanan Pemilu. *Bawaslu*, 306. Bawaslu Kabupaten Jepara. (2021). <https://jepara.bawaslu.go.id/memahami-literasi-politik/>. Bawaslu Kabupaten Jepara. <https://jepara.bawaslu.go.id/memahami-literasi-politik/>